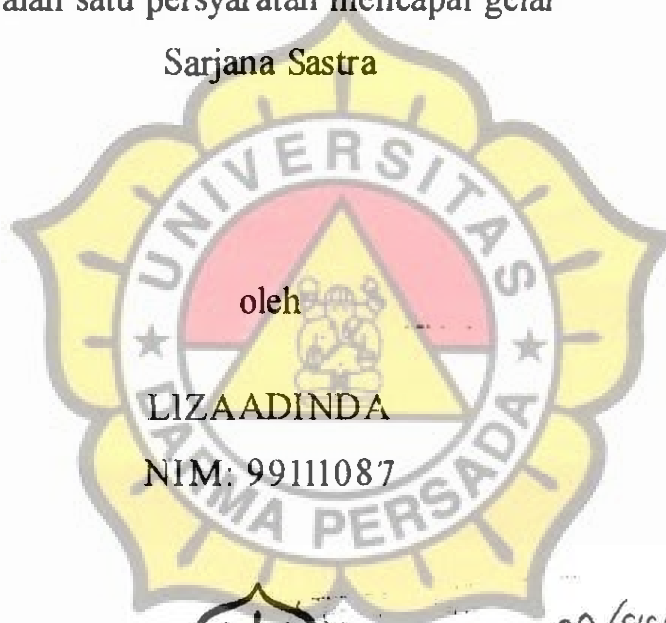


NAKASONE YASUHIRO  
PERDANA MENTERI YANG BERHALUAN  
KERAS  
(1982-1986)



Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai  
Salah satu persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Sastra



oleh

LIZAADINDA

NIM: 99111087



09/sicr-fsJ/03-04  
920-AD1-n  
BIOGRAFI  
LIZA A  
SKR - FSJ  
19-2-04

JURUSAN SASTRA JEPANG  
FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2003

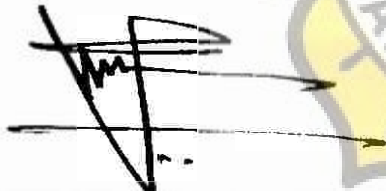
Skripsi yang berjudul  
NAKASONE YASUHIRO  
PERDANA MENTERI YANG BERHALUAN KERAS  
(1982-1986)

Oleh  
LIZAADINDA  
99111087

telah diuji dan diterima baik (lulus) pada tanggal 06 Mei 2003 di hadapan Panitia  
Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Jepang

Mengetahui,  
Pembimbing

Ketua Panitia Sidang



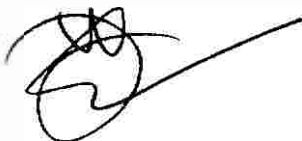
( Prof. DR. I Ketut Surajaya, MA )



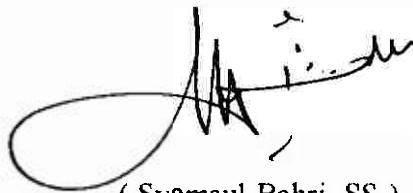
( Dra. Tini Priantini )

Ketua Jurusan Sastra Jepang

Pembaca



( Dra. Yuliasih Ibrahim )



( Syamsul Bahri, SS )

UNIVERSITAS DARMA PERSADA  
FAKULTAS SASTRA  
JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Judul

Nakasone Yasuhiro

Perdana Menteri Yang Berhaluan Keras (1982-1986)

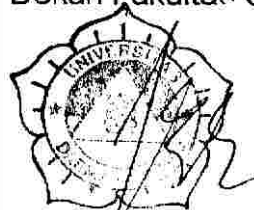
SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat  
meraih gelar Sarjana Sastra  
Jurusan Asia Timur

Telah disahkan

Pada Hari Selasa  
Tanggal: 20 Mei 2003

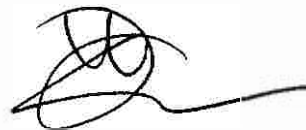
Dekan Fakultas Sastra



FAKULTAS SASTRA

Dra. Inny C. haryono, MA

Ketua Jurusan Program Studi  
Bahasa dan Sastra Jepang



Dra. Yuliasih Ibrahim

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kemudahan sehingga skripsi ini akhirnya dapat selesai tepat pada waktunya.

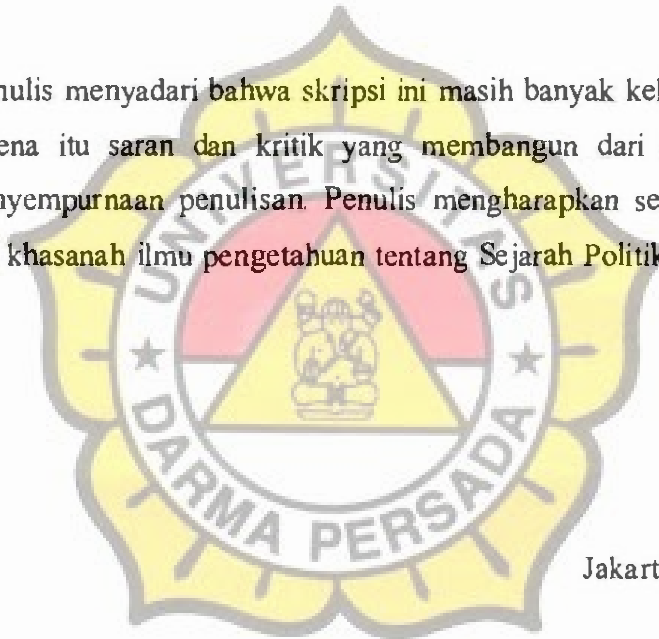
Penyusunan skripsi merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai gelas Sarjana Sastra pada Fakultas Sastra Jurusan Asia Timur, program studi Bahasa dan Sastra Jepang di Universitas Darma Persada, Jakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat selesai, karena itu penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. I Ketut Surajaya, MA, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Syamsul Bahri, SS, selaku Pembantu Dekan III bidang Kemahasiswaan dan juga sebagai pembaca skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Tini Priantini, selaku Pembantu Dekan II bidang Administrasi dan sebagai Ketua Sidang.
4. Ibu Dra. Yuliasih Ibrahim, selaku Kepala Jurusan Sastra Jepang yang juga sekaligus sebagai Pembimbing Akademik penulis.
5. Ibu Dra. Inny C. Haryono, MA, selaku Dekan Fakultas Sastra.
6. Seluruh Dosen-dosen Pengajar, yang pernah memberikan pengetahuan luas kepada penulis.
7. Kepada anak-anak kelas A, yang menjadi teman seperjuangan penulis, khususnya Melanie (Mel-ce), Shinta (Bebek), I'I, Dita, Irma, Nunik, Echi, Davis (To Ming Tse), Tila, Yati ( pada saat ini berada di Jepang, yang juga ikut memberikan dorongan dan semangat dari jauh), Cris, Dodi, Smarties, Bu broto, Meta (Oreo), Atik, Ai.

8. Rekan-rekan Mahasiswa S-1 Program Studi Bahasa dan Sastra, Universitas Darrna Persada, khususnya angkatan '98 dan '99, yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk penyelesaian skripsi ini, Mba Indri ( Mami ), Diah, Nisa ( Baja ).
9. Orang tua dan kakak-kakak penulis, yang telah banyak memberikan bantuan, semangat dan doa untuk penyelesaian skripsi ini. Termasuk Heykal, Wirda, Sakinah, Hafid.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan Kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari segala pihak diharapkan dalam penyempurnaan penulisan. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang Sejarah Politik Jepang.



Jakarta, Mei2003

Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Pembatasan Masalah	7
1.3	Tujuan	9
1.4	Ruang Lingkup	9
1.5	Metode Penelitian	10
1.6	Sistematika Penulisan	10

BAB II. RIWAYAT HIDUP NAKASONE YASUHIRO

2.1	Kesuksesan di SMA Shizuoka	12
2.2	Universitas Tokyo	17
2.3	Angkatan Laut, Letnan Pengganti	19
2.4	Perjalanana ke Dunia Politik	22
2.5	Rekonstruksi Nasional	26
2.6	Menjelang Kepemimpinannya	29

BAB III. NAKASONE YASUHIRO PERDANA MENTERI yang  
BERHALUAN KERAS

3.1	Pengangkatan sebagai Perdana Menteri	34
3.2	Pemimpin Partai Liberal Demokrat dan Perdana Menteri Jepang yang Kontroversial	38
3.3	Kontroversi Kunjungan Yasuhiro ke Kuil Yasukuni	55
3.4	Nakasone dan Pertahanan Jepang	57
3.5	Berakhirnya Masa Jabatan PM Nakasone Yasuhiro	62

BAB IV	KESIMPULAN	65
DAFTAR PUSTAKA		69
Kronologi Riwayat Hidup Nakasone Yasuhiro		71
GLOSARI		75
LAMPIRAN		



# BABI

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Jepang adalah negara yang pemerintahannya banyak memiliki konflik daripada konsensus, meskipun sebagian sudah dapat teratasi oleh lamanya periode pemerintahan konservatif. Sebagian besar masalah yang terdapat pada periode masa pendudukan atau akibat dari langkah perkembangan Jepang yang dipaksakan itu tetap tidak terpecahkan. Walaupun ada usaha untuk memecahkannya sama sekali tidak tuntas. Dengan demikian, dalam politik Jepang selalu ada ketegangan laten dan tampak jelas, walaupun dibandingkan dengan negara-negara lain, Jepang nampak sudah begitu stabil.<sup>1</sup>

Berkembangnya Jepang menjadi negara industri dan kapitalis yang mempunyai daerah koloni dan "spheres of influences" (pengaruh lingkungan) di daratan Asia dan di kawasan Samudera Pasifik, pada hakekatnya merupakan hasil usahanya mengikuti jejak negara-negara kapitalis dan imperialis dari Barat yang sudah berabad-abad bergerak dan bersaing keras demi kepentingannya masing-masing di seluruh kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Timur.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>JAA Stockwin, *Pluralisme Politik dan Kemajuan Ekonomi Jepang* (Yogyakarta : 1984 ), P.4-5

<sup>2</sup>Mohammad Sudjiman, *Serba-serbi Tentang Jepang Dengan ciri Khasnya* ( Jakarta; 1998),P.4

Keadaan politik Jepang cukup rumit dan tidak mudah untuk diringkas menjadi satu bagian yang sederhana. Konsep sistem politik merupakan pokok dari gerakan pembaharuan yang timbul dalam dasawarsa 50-an. Gerakan ini ingin mencari suatu "*new science of politics*" dan lebih terkenal dengan istilah "pendekatan tingkah laku" atau dikatakan sebagai "tingkah laku politik" yang mana dijadikan fokus utama dari penelitian, dan yang terutama menekankan struktur dan fungsi tingkah laku. Konsep sistem politik dalam penerapannya pada situasi yang konkrit seperti negara Jepang ini, mencoba mempelajari tentang gejala-gejala politik dalam konteks tingkah laku dalam masyarakat maupun pemerintahannya.

Teori politik pada umumnya adalah bahasan dan generalisasi dari phenomena yang bersifat politik, dengan kata lain adalah bahasan dan renungan atas tujuan dalam melaksanakan prakteknya, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan – kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu sendiri.<sup>3</sup> Konsep – konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, perkembangan politik, modernisasi, dsb.<sup>4</sup>

Sama seperti dengan negara lain, masalah kekuasaan, partisipasi, perwakilan, dan birokrasi menjadi suatu titik pusat dalam permasalahan politik Jepang. Di lain pihak, langkah dan tidak adanya kesinambungan

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* ( Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1972), P. 30

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *loc.cit.*

Keadaan politik Jepang cukup rumit dan tidak mudah untuk diringkas menjadi satu bagian yang sederhana. Konsep sistem politik merupakan pokok dari gerakan pembaharuan yang timbul dalam dasawarsa 50-an. Gerakan ini ingin mencari suatu "*new science of politics*" dan lebih terkenal dengan istilah "pendekatan tingkah laku" atau dikatakan sebagai "tingkah laku politik" yang mana dijadikan fokus utama dari penelitian, dan yang terutama menekankan struktur dan fungsi tingkah laku. Konsep sistem politik dalam penerapannya pada situasi yang konkrit seperti negara Jepang ini, mencoba mempelajari tentang gejala-gejala politik dalam konteks tingkah laku dalam masyarakat maupun pemerintahannya.

Teori politik pada umumnya adalah bahasan dan generalisasi dari phenomena yang bersifat politik, dengan kata lain adalah bahasan dan renungan atas tujuan dalam melaksanakan prakteknya, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan – kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu sendiri.<sup>3</sup> Konsep – konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, perkembangan politik, modernisasi, dsb.<sup>4</sup>

Sama seperti dengan negara lain, masalah kekuasaan, partisipasi, perwakilan, dan birokrasi menjadi suatu titik pusat dalam permasalahan politik Jepang. Di lain pihak, langkah dan tidak adanya kesinambungan

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* ( Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1972), P. 30

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *loc.cit.*

perkembangan politik Jepang sejak pertengahan abad ke 19, telah mengakibatkan ketegangan serius pada kehidupan politik negara Jepang.

Pada abad yang lalu, Jepang memiliki 2 UUD yang saling bertentangan. UUD Meiji tahun 1890 merupakan suatu UUD yang pada akhirnya gagal untuk mengarahkan jalan menuju kestabilan sosial maupun ekonomi yang berdampak pada politik Jepang. Tetapi UUD 1947 atau yang dibuat oleh pemerintah pendudukan Amerika justru membawa angin baru tersendiri, dengan adanya kestabilan pemerintah, negara, ekonomi dan sosial.<sup>5</sup> Dari perspektif tahun 1970 – an, susah untuk dibayangkan bahwa betapa sulitnya memecahkan masalah politik Jepang yang berkepanjangan, sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu, pemerintahan Jepang dijalankan sesuai dengan mempertahankan status quo.<sup>6</sup> Konstitusi Jepang memberi ciri dan citra kepada konstitusi sebagai "*Heiwa Kenpo*" ( Konstitusi Perdamaian ) dan kepada negara Jepang sebagai "*Heiwa Kokka*" ( Negara Perdamaian ). Selanjutnya dapat diperhatikan bahwa nama atau sebutan untuk masa pemerintahan kaisar sekarang adalah "*Heisei*" yang berarti adalah "*Achieving Peace*" ( mancapai perdamaian ).<sup>7</sup>

Menurut konstitusi baru, Jepang adalah negara monarki konstitusional dengan kaisar sebagai lambang atau simbol Negara dan

<sup>5</sup> JAA Stockwin, *Pluralisme Politik dan Kemajuan Ekonomi Jepang* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1984), p. 5

<sup>6</sup> *ibid.*, p. 13

<sup>7</sup> Mohammad Su'jiman, *op.cit.*, p.86

persatuan Rakyat.<sup>8</sup> Konstitusi baru selanjutnya menetapkan antara lain bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, sistem pemerintahannya adalah sistem kabinet parlementer (Diet) dengan parlemen yang terdiri dari "shugi - in" ( Majelis Rendah ) dan "sangi - in" ( Majelis Atas ). Konstitusi menjamin hak - hak dasar individu menurut paham demokrasi liberal, menghapus golongan bangsawan dan menghapus pula perbedaan antara hak - hak pria dengan wanita. Partai politik terbesar adalah "Jiyu Minshuto" ( Liberal Democratic Party / Partai Liberal Demokrat ) yang mempunyai mayoritas kursi dan suara di "Shugi-in" dan berperan sebagai partai pemerintahan sejak tahun 1955.<sup>9</sup>

Pertengahan zaman Showa, seiring dengan pembentukan Partai Liberal Demokrat ( LDP ) pada tahun 1955, membuat elite politik makin kuat untuk bersaing menjadi penguasa nomor satu di Jepang. Pembentukan Partai Liberal Demokrat pada tahun 1955 ini merupakan suatu pencapaian politik yang pengaruhnya sangat besar dalam dunia perpolitikan Jepang. Pengaruhnya yang paling nyata dan secara umum dapat diterima adalah tegaknya stabilitas politik selama suatu periode yang panjang bila dibandingkan dengan partai-partai yang berdiri di tahun 1920-an dan 1930-an serta keadaan pada tahun 1945-an, jelas keadaan politik di zaman pertengahan Showa ini merupakan langkah pertama yang cukup menguntungkan meski tak lepas dari berbagai permasalahan

<sup>8</sup> The Constitution of Japan, chapter I : Emperor, Article 1

<sup>9</sup> Mohammad Sudjiman, *op.cit.* , p.86

politik.<sup>10</sup> Secara umum sebenarnya Jepang pada saat itu, pemerintahannya memegang sistem politik partai tunggal, tetapi sejak adanya partai oposisi yang merupakan perpecahan dari partai-partai tunggal tadi menjadikan sistem partai politik di Jepang menjadi sistem dwi partai. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengkritik utama terhadap partai yang duduk di pemerintahan atau bagi partai yang menang. Sistem dwi partai ini pernah disebut sebagai "*a convenient system for contented people*", yang maksudnya adalah komposisi masyarakatnya homogen, dan adanya perjalanan sejarah serta azas dan tujuan sosial yang kuat.<sup>11</sup>

Setelah perang dunia II, pejuang-pejuang Jepang yang telah melawan Amerika tidaklah didukung oleh bangsanya sendiri, justru mereka dikecam karena membuat Jepang porak-poranda. Justru merekalah yang disebut "*penjahat perang*". Jepang memprotes keras adanya militer di Jepang, tetapi justru ada salah seorang perdana menteri yang mulai menjabat pada tahun 1982, *Nakasone Yasuhiro*, yang ingin membangun kembali kemiliteran Jepang sebagai bentuk pertahanan, tetapi hal ini dikritik keras oleh bangsa Jepang. Menurutnya, suatu negara harus memiliki pertahanan ( *Self Defense* ) bagi keutuhan bangsanya, suatu kekalahan atau kehancuran bukanlah menjadi suatu masalah justru menjadi pelajaran bagi negaranya itu sendiri. Oleh karena itulah pejuang-pejuang Jepang yang dianggap sebagai penjahat perang dimakamkan di

---

<sup>10</sup> JAA Stockwin, *op.cit.*, p.141

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, *op.cit.*, p. 169

suatu tempat yang diberi nama "*Yasukuni Jinja*" atau "*Kuil Yasukuni*", yang menjadi suatu polemik politik juga bagi negara Jepang serta bagi *Nakasone Yasuhiro* yang mendapat kritikan keras mengenai pendapatnya tentang *Yasukuni*. Pada tanggal 15 Agustus 1985, Perdana Menteri *Nakasone Yasuhiro* selaku pimpinan anggota kabinet Jepang pada waktu itu, mengadakan ziarah ke *Yasukuni Jinja*, yaitu kuil Shinto, tempat persemayaman arwah yang gugur dalam perang dunia I dan perang dunia II. Peristiwa itu menimbulkan reaksi di kalangan luas rakyat Jepang, yang menganggap perbuatan pemerintah itu bertentangan dengan hukum atau konstitusi, yang menegaskan bahwa adanya pemisahan antara negara dan agama. Ziarah ke kuil Shinto seperti *Yasukuni Jinja* ini tidak boleh dilakukan oleh seorang pejabat negara dalam kedudukannya yang resmi. Memperhatikan semua itu, Perdana Menteri *Nakasone Yasuhiro* memberikan pengumuman yang menyatakan bahwa ia tidak akan berziarah lagi ke kuil *Yasukuni* sebagai kunjungan resmi kenegaraan.<sup>12</sup>

Terpilihnya *Nakasone Yasuhiro* sebagai pemimpin baru Jepang pada tahun 1982, yang menggantikan *Suzuki Zenko* ini memiliki dampak terhadap perkembangan politik internasional terutama hubungan Jepang dengan Amerika Serikat dan juga di kawasan Asia Pasifik. Jepang berada di sisi Amerika Serikat dalam percaturan politik Internasional sejak Perang Dingin dan orientasi dasar ini akan diteruskan oleh *Nakasone* yang telah mengatakan bahwa hubungan Jepang – Amerika Serikat akan tetap mendasari politiknya. Akan tetapi yang harus kita perhatikan adalah

<sup>12</sup> Mohammad Sudjiman, *op.cit.*, p.72

bagaimana manifestasi politik Nakasone yang dikenal sebagai tokoh politik yang kontroversial itu.<sup>13</sup>

Nakasone yang lahir pada tanggal 27 Mei 1918 ini, merupakan anak laki-laki ke-2 dari 6 bersaudara, ayah dari Nakasone bernama Matsugoro II, yang merupakan generasi ke-16 setelah *Nakasone Jurou*. Sedangkan ibunya bernama Yuku, putri terakhir dari keluarga *Nakamura*. Kesungguhan Nakasone dalam menggeluti dunia politik, sepertinya sudah terlihat sejak ia duduk di bangku sekolah dasar, dengan didikan ayahnya yang disiplin ia selalu bersikap patuh, hormat, jujur, itulah yang menandakan kelak ia akan menjadi salah satu penguasa nomor satu di negeri matahari tersebut.<sup>14</sup>

## 1.2 Pembatasan Masalah

Dalam dunia politik Jepang, Nakasone diakui sebagai politikus ulung tetapi kontroversial karena dianggap oportunist. Ini juga kelihatan dalam nama julukannya "Weather Vane" yang menggambarkan sifatnya yang selalu dapat menyesuaikan diri dengan angin yang sedang bertiup.

Jepang dikalahkan oleh kekuatan sekutu pada Perang Dunia ke-II setelah dijatuhkannya bom atom di *Hiroshima* dan *Nagasaki*, dan selama 6 tahun (1945-1951) Jepang diduduki oleh sekutu terutama oleh tentara

<sup>13</sup>Lie Tek Tjeng, *Percaturan Politik di Kawasan Asia Pasifik* (Jakarta: PT. Karya Unipresss, 1983), p. 123

<sup>14</sup>Nakasone Yasuhiro, *The Making of the new Japan*, p.1-2

Amerika Serikat. Jepang memperoleh kembali kemerdekaannya kembali melalui Perjanjian Perdamaian San Francisco tahun 1951 yang dipelopori dan diperjuangkan oleh Amerika. Yang menjadi modal utama bagi negara Jepang yang telah berhasil membangun kembali negaranya adalah rakyat Jepang yang rajin, hemat, bekerja keras, berpendidikan, trampil dan disiplin.

Tetapi walau bagaimanapun juga bangsa Jepang memiliki harga diri yang tinggi, tidak bisa melupakan pengalaman paling pahit dalam sejarahnya, yaitu dikalahkan dan diduduki oleh Amerika. Terdapatnya perbedaan fundamental antara negara Jepang dan Amerika seperti dalam hal kebudayaan, membuat bangsa Amerika salah mengerti tentang sikap bangsa Jepang yang tertutup dan tidak langsung (closed and indirect culture) dibandingkan bangsa Amerika yang terbuka dan terus terang. Akhirnya sering timbul pertentangan dan perdebatan pendapat tentang kebijaksanaan politik sebagai akibat perbedaan pandangan dan kepentingan nasional yang diakibatkan dari perbedaan bersikap tadi.

Oleh karena itulah, penyusunan skripsi ini akan membahas Perdana Menteri Nakasone Yasuhiro, yakni perdana menteri (PM) yang berhaluan keras dan juga sebagai perdana menteri yang ingin menghidupkan kembali militerisme. Penyusunan skripsi ini juga akan membahas mengenai kehidupan Nakasone, kariernya di bidang politik, serta bagaimana hubungan Jepang – Amerika ketika Nakasone menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang periode 1982-1986.

### 1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah menjelaskan kebijakan-kebijakan Nakasone Yasuhiro dalam menjalankan tugasnya sebagai perdana menteri Jepang dan meyakinkan kembali bagi rakyat Jepang agar dapat mempercayai Nakasone kembali, yang pada saat itu mendapat mosi tidak percaya dari bangsanya sendiri karena masalah menjalin kembali hubungan Jepang – Amerika dalam bidang pertahanan, dan juga sebagai perdana menteri yang ingin membangkitkan kembali militerisme, dimana hal tersebut ditentang oleh rakyat Jepang pada saat itu.

Disamping itu penulis bermaksud untuk mengenal lebih jauh salah satu tokoh politik Jepang yang kontroversi ini dalam menjalankan kariernya dalam bidang politik, serta latar belakang hidupnya dan juga jalan pemikirannya yang menjadi salah satu pondasi dalam kesuksesannya di dunia sejarah politik Jepang pada saat itu.

### 1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pelbagai permasalahan yang dihadapi oleh *Nakasone Yasuhiro* dalam penyusunan skripsi ini mencakup pembatasan waktu ketika menjalin hubungan antara negara Jepang dengan Amerika, juga polemik politik yang dihadapi Nakasone yang akan dibatasi dalam kurun waktu antara tahun 1982-1986, ketika ia menjabat sebagai PM Jepang.

## 1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini langkah-langkah yang ditempuh adalah mengumpulkan data-data dari berbagai buku yang isinya berkaitan dengan subjek penulisan. Bahan-bahan ini diperoleh dari perpustakaan Universitas Darma Persada, Perpustakaan Japan Foundation dan juga perpustakaan umum CSIS. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa guna memperoleh sejumlah fakta sejarah. Fakta yang diperoleh kemudian disusun secara kronologis dan berkesinambungan. Guna mendapatkan data yang dimaksud, maka metode penulisan yang dilakukan adalah metode kepustakaan dengan pembahasan yang bersifat deskriptif analitis

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam suatu penulisan biasanya terdiri dari beberapa bab dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan. Berdasarkan hal tersebut penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi 4 bab, yaitu:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan, di dalam bab ini diuraikan latar belakang yang berkaitan dengan sejarah politik pada zaman pertengahan Showa serta sedikit ulasan mengenai munculnya PM Nakasone Yasuhiro beserta kiprahnya dan latar belakang yang singkat tentang hidupnya.

Disamping itu dalam bab ini juga terdapat pembatasan masalah, tujuan, ruang lingkup, metode penulisan dan sistem penulisan.

## **BAB II RIWAYAT HIDUP NAKASONE YASUHIRO**

Bab ini membahas latar belakang kehidupan dan keluarga Nakasone Yasuhiro serta menjelang kariernya sebagai PM Jepang antara tahun 1982-1986.

## **BAB III NAKASONE YASUHIRO PERDANA MENTERI yang BERHALUAN KERAS**

Bab ini merupakan bab isi, pada bab inilah akan dibahas permasalahan serta ruang lingkup yang telah diambil, serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh PM Nakasone Yasuhiro.

## **BAB IV KESIMPULAN**

Bab ini merupakan kesimpulan pembahasan dari masalah dan juga solusi yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya.